



**BUPATI BANTUL**  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.532.547.348.493,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp762.376.130.146,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp408.211.152.680,00 (empat ratus delapan miliar dua ratus sebelas juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh ru[ia]h).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.428.795.450,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.536.487.148,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

#### Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Air Tanah;
- c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

#### Pasal 6

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas :
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp2.875.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b. Pajak Reklame Kain Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp69.125.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp103.766.000.000,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp101.797.000.000,00 (seratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), terdiri atas:
  - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman Rp31.650.000.000,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. PBJT-Tenaga Listrik Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
  - c. PBJT-Jasa Perhotelan Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
  - d. PBJT-Jasa Parkir Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
  - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (7) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp90.478.012.680,00 (sembilan puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp38.233.140.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.428.795.450,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri dari atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp270.136.278.200,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp262.543.867.607,00 (dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp2.304.402.842,00 (dua miliar tiga ratus empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp278.960.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp4.875.245.251,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
  - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp21.602.500,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
  - f. Retribusi Pelayanan Kebersihan Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.524.517.250,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp1.845.350.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Retribusi Tempat Pelelangan Rp86.700.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp50.032.244.000,00 (lima puluh miliar tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
  - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp1.070.550.250,00 (satu miliar tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp199.673.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.768.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), terdiri atas :
  - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah); dan
  - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp20.199.694.868,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah lembaga keuangan sebesar Rp19.692.694.868,00 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
  - b. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah aneka usaha sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta); dan
  - c. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah bidang air minum sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp7.536.487.148,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari atas :
  - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - e. pendapatan bunga;
  - f. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; dan
  - g. pendapatan denda Retribusi Daerah.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.036.421,00 (satu miliar dua belas juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
  - a. hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp907.036.421,00 (sembilan ratus tujuh juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah); dan
  - b. hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil sewa BMD, direncanakan sebesar Rp219.950.727,00 (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
  - a. hasil sewa Barang Milik Daerah sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah); dan
  - b. hasil kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebesar Rp181.950.727,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jasa giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah, direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pendapatan denda retribusi jasa umum, direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.770.171.218.347,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.584.607.675.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. dana desa;
  - b. Insentif Fiskal;
  - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
  - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp121.564.824.000,00 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp22.624.496.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp29.513.613.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. DBH Pajak Rp 28.621.450.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp892.163.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- (6) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.027.186.190.000,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp936.108.412.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar seratus delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
  - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Rp91.077.778.000,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp383.718.552.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. DAK Fisik Rp32.702.500.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. DAK Non Fisik Rp351.016.052.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar enam belas juta lima puluh dua ribu rupiah).
- (8) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.563.543.347,00 (seratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (9) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp100.982.556.237,00 (seratus miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (10) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, direncanakan sebesar Rp84.580.987.110,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 11

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.671.602.861.975,03 (dua triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah koma nol tiga), terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 13

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.054.086.694.941,00 (dua triliun lima puluh empat miliar delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.060.215.195.395,00 (satu miliar enam puluh miliar dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp897.660.538.497,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp92.581.161.049,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.629.800.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.060.215.195.395,00 (satu triliun enam puluh miliar dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOSP; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp640.338.588.802,00 (enam ratus empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah), terdiri atas :
  - a. Gaji Pokok ASN Rp479.718.433.581,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp43.260.864.957,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp7.316.093.042,00 (tujuh miliar tiga ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp37.711.148.575,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);



- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp6.735.488.361,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp25.191.951.713,00 (dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp4.349.047.592,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp15.771.682,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp28.711.353.756,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.126.566.722,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp3.305.440.188,00 (tiga miliar tiga ratus lima juta empat ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah); dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp2.896.428.633,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp359.870.003.568,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp46.580.588.600,00 (empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp1.331.100.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah).
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp109.116.027.766,00 (seratus sembilan miliar seratus enam belas juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp202.842.287.202,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
  - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp3.456.250.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp5.188.300.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

- f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp5.089.850.000,00 (lima miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - g. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp175.075.526.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
  - h. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.071.250.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - i. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp12.720.511.202,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus dua rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp25.023.928.592,00 (dua puluh lima miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp136.659.600,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp63.194.900,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp222.999.600,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.061.473.392,00 (tujuh miliar enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp4.723.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp51.030.000,00 (lima puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp371.674.520,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp30.576.000,00 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp196.560.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp14.194.320,00 (empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp6.638.520,00 (enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp3.920,00 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp13.453.440,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah)
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp262.080,00 (dua ratus enam puluh dua ribu delapan puluh rupiah); dan
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp786.240,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf g direncanakan sebesar Rp16.385.759.656,00 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf h direncanakan sebesar Rp17.132.120.257,00 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp897.660.538.497,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.792.779.948,00 (seratus tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. belanja barang pakai habis Rp130.025.477.908,00 (seratus tiga puluh miliar dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah);
  - b. belanja barang tak habis pakai Rp382.642.040,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah); dan
  - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp384.660.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp313.910.005.209,00 (tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ribu dua ratus Sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp233.659.388.530,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp45.817.899.796,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
  - c. Belanja Sewa Tanah Rp1.301.204.391,00 (satu miliar tiga ratus satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp10.276.847.492,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp1.832.140.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp0,00 (nol rupiah);
  - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp3.604.725.000,00 (tiga miliar enam ratus empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp7.397.500.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp9.948.900.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.769.016.911,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp10.261.755.000,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp12.119.447.557,00 (dua belas miliar seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp10.123.314.354,00 (sepuluh miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
  - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang direncanakan sebesar Rp44.456.220.000,00 (empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.118.322.200,00 (tiga puluh miliar seratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp9.716.910.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp20.401.412.200,00 (dua puluh miliar empat ratus satu juta empat ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp83.562.588.357,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Rp82.400.203.857,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus juta dua ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
  - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Rp751.694.500,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
  - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Rp410.690.000,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.809.428.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp237.242.177.872,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp92.581.161.049,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu empat puluh Sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp247.660.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.494.261.349,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Rp18.308.552.500,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp5.130.125.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp7.770.583.849,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah).
  - d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
  - e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta direncanakan sebesar Rp57.306.061.700,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.533.178.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.629.800.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.739.800.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp207.482.581.115,00 (dua ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus lima belas rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.

## Pasal 22

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

## Pasal 23

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp52.847.361.367,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Alat Peraga;
  - m. Belanja Modal Rambu-rambu;
  - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
  - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.891.799.900,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp2.144.800.000,00 (dua miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
  - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp2.746.999.900,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.475.285.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp3.399.785.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp864.753.790,00 (delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp315.986.790,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp33.987.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp514.780.000,00 (lima ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.744.005.247,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Kantor Rp1.806.698.847,00 (satu miliar delapan ratus enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
  - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.937.306.400,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp658.334.511,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Studio Rp235.250.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Belanja Modal Alat Komunikasi Rp411.434.511,00 (empat ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah); dan
  - Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp11.650.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp4.530.244.025,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu dua puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp474.735.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp177.985.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp247.250.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.085.692.000,00 (enam miliar delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
- Belanja Modal Komputer Unit Rp3.323.992.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
  - Belanja Modal Peralatan Komputer Rp2.761.700.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Belanja Modal Sumur direncanakan sebesar Rp258.600.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Alat Pelindung direncanakan sebesar Rp590.240.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp456.100.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah).



- (14) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp1.360.382.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp14.889.119.886,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Rp14.597.229.386,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Rp208.890.500,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
  - c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp9.545.570.008,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp10.043.144.343,00 (sepuluh miliar empat puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp9.530.944.343,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti, direncanakan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas, direncanakan sebesar Rp158.700.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp134.799.583.304,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.860.826.775,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan Rp48.547.073.775,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Jembatan Rp8.313.753.000,00 (delapan miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.375.646.929,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp11.775.787.929,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp 3.204.600.000,00 (tiga miliar dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp2.030.000.000,00 (dua miliar tiga puluh juta rupiah); dan
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp7.365.259.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.693.384.600,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp3.787.169.600,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
  - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp10.946.215.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp1.960.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.869.725.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp14.941.800.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik Rp21.927.925.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp9.228.492.101,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus satu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP; dan
  - d. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.505.200.000,00 (satu miliar lima ratus lima juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
  - b. Belanja Modal Tanda Penghargaan Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.629.792.101,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus satu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Rp7.627.797.101,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus satu rupiah).
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp48.961.912.720,03 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh koma nol tiga rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp361.071.673.199,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.671.261.169,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, direncanakan sebesar Rp39.671.261.169,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah).
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp321.400.412.030,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar empat ratus juta empat ratus dua belas ribu tiga puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (6) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp143.947.030,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp321.256.465.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp139.055.513.482,03 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah), terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp165.755.513.482,03 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah), terdiri atas :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.755.513.482,03 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp0,00 nol rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp26.700.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas :
  - a. Penyertaan modal daerah; dan
  - b. Pemberian pinjaman daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp26.700.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 32

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp139.055.513.482,03) (seratus tiga puluh sembilan miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp139.055.513.482,03 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma nol tiga rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. LAMPIRAN I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. LAMPIRAN III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. LAMPIRAN IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. LAMPIRAN V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. LAMPIRAN VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. LAMPIRAN VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. LAMPIRAN VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. LAMPIRAN IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. LAMPIRAN X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 66



**KABUPATEN BANTUL**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>762.376.130.146,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	408.211.152.680,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.700.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.875.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.875.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	250.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	250.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	575.000.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	575.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	12.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	12.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	69.125.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	69.125.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	69.125.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	103.766.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	103.766.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	103.766.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	101.797.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	31.650.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	21.390.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	10.260.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	60.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	60.000.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	9.000.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	9.000.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	147.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	147.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.000.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	474.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	192.000.000,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	220.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	90.000.000,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	4.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	90.478.012.680,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	90.478.012.680,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	90.478.012.680,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	38.233.140.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	38.233.140.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	38.233.140.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	326.428.795.450,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	270.136.278.200,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	262.543.867.607,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	65.452.221.229,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	196.741.646.378,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	350.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.304.402.842,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.304.402.842,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.960.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.960.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	4.875.245.251,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	215.201.101,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	3.097.977.675,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.562.066.475,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.602.500,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.602.500,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	112.200.000,00
4.1.02.01.14.0003	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	112.200.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	53.524.517.250,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.845.350.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.491.990.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	338.110.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	15.250.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	86.700.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	86.700.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	250.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	250.000.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	35.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.032.244.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.032.244.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.070.550.250,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	659.605.250,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	80.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	281.250.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	49.695.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	199.673.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	199.673.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.768.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.205.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.205.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	563.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	563.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	20.199.694.868,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.692.694.868,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.692.694.868,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	157.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	157.000.000,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	350.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	350.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.536.487.148,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.012.036.421,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	907.036.421,00
4.1.04.01.02.0029	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	667.036.421,00
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	240.000.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	105.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	105.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	219.950.727,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	38.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	38.000.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	181.950.727,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	181.950.727,00
4.1.04.05	Jasa Giro	275.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	275.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	275.000.000,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.000.000,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.000.000,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	6.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	16.500.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.500.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.500.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.000.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	10.000.000,00
4.1.04.13.01.0025	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los	6.000.000,00
4.1.04.13.01.0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	4.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.770.171.218.347,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.584.607.675.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	121.564.824.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	121.564.824.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	121.564.824.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	22.624.496.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	22.624.496.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	22.624.496.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	29.513.613.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	28.621.450.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	903.660.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	27.717.790.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	892.163.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	890.550.000,00
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.613.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.027.186.190.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	936.108.412.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	936.108.412.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	91.077.778.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	15.936.724.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	36.623.753.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	22.127.169.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	16.390.132.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	383.718.552.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	32.702.500.000,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	12.920.150.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.316.097.000,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	699.939.000,00
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	311.892.000,00
4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	216.600.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	5.975.795.000,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	7.262.027.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	351.016.052.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	809.955.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	99.306.210.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.873.000.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	22.615.740.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	645.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	5.061.900.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	180.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.605.841.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	744.612.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	24.809.428.000,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	175.075.526.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.071.250.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6.711.900.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.563.543.347,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	100.982.556.237,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	100.982.556.237,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.389.662.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	86.139.825,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	51.506.754.412,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	84.580.987.110,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	84.159.098.110,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	84.159.098.110,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	421.889.000,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	421.889.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.532.547.348.493,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.054.086.694.941,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.060.215.195.395,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	640.338.588.802,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	479.718.433.581,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	406.611.729.560,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	73.106.704.021,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	43.260.864.957,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	36.636.933.648,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.623.931.309,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.316.093.042,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.316.093.042,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	37.711.148.575,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	33.287.418.575,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.423.730.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.735.488.361,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.735.488.361,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	25.191.951.713,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.621.312.197,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.570.639.516,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.349.047.592,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.001.999.012,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	347.048.580,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.771.682,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.842.476,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.929.206,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	28.711.353.756,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	26.085.275.363,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.626.078.393,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.126.566.722,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	998.083.465,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	128.483.257,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.305.440.188,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.912.161.969,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	393.278.219,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.896.428.633,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.669.415.430,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	227.013.203,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	359.870.003.568,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	46.580.588.600,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	43.528.400.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.052.188.600,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.331.100.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.331.100.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	109.116.027.766,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	97.269.316.366,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	11.846.711.400,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	202.842.287.202,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	185.000.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	55.000.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.456.250.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.188.300.000,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.089.850.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	175.075.526.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.071.250.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	12.720.511.202,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.023.928.592,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.659.600,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.659.600,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.194.900,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.194.900,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	222.999.600,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	222.999.600,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.061.473.392,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	95.611.824,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.957.600.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.723.200.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.723.200.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	51.030.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	51.030.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	371.674.520,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	109.200.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	30.576.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	30.576.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	196.560.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	196.560.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.194.320,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.194.320,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.638.520,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.638.520,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.920,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.920,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	13.453.440,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	13.453.440,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	262.080,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	262.080,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	786.240,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	786.240,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.093.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	700.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	700.000.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	16.385.759.656,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	16.385.759.656,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	16.385.759.656,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	17.132.120.257,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	17.132.120.257,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	17.132.120.257,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	897.660.538.497,00
5.1.02.01	Belanja Barang	130.792.779.948,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	130.025.477.908,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.190.833.297,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.546.710.281,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.116.416.845,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.586.453.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	167.525.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	191.575.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	307.218.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	650.446.400,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	846.872.434,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	149.316.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	203.656.300,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	15.061.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	74.715.720,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	23.310.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.507.880.138,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.461.674.251,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.138.967.181,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	259.700.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.257.519.900,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.693.481.418,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.156.483.615,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.689.160.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.065.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.042.773.178,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	101.054.600,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.582.278.250,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.607.409.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	234.825.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	607.460.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	547.032.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.360.083.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.084.215.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	494.824.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	7.677.680.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.315.526.900,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	200.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	378.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	37.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	50.400.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	912.600.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	979.650.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	1.020.575.000,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	205.800.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	716.900.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.597.050.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	382.642.040,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	379.680.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.962.040,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	384.660.000,00
5.1.02.01.04.0075	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	810.000,00
5.1.02.01.04.0091	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	1.800.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.170.000,00
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.180.000,00
5.1.02.01.04.0448	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	26.600.000,00
5.1.02.01.04.0463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	334.100.000,00
5.1.02.01.04.0465	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	16.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	313.910.005.209,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	233.659.388.530,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	415.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.766.900.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.588.840.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.800.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	78.950.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	49.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	759.900.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	608.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	34.686.946.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.095.920.960,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	303.361.980,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.073.811.755,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.308.826.039,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	3.347.294.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	509.875.128,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	411.364.435,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.184.325.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.332.486.699,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.810.229.199,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.546.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.454.562.776,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.200.227.158,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	28.326.396,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.420.860.999,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	311.590.356,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	415.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	907.625.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	123.750.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.545.262.564,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	252.500.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	576.236.900,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.666.950.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	13.567.510.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	60.300.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	429.840.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	502.674.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.823.700.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	422.350.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	729.150.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	13.368.000.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	216.500.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.992.350.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	44.200.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	16.000.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	144.980.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.437.819.386,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	30.294.000.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	701.695.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	25.340.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.456.000.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	586.056.800,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	45.817.899.796,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.880.275.000,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	38.972.404.800,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.500.004.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.453.519.742,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	554.376.248,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	457.319.206,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	1.301.204.391,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	462.583.710,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	406.857.977,00
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	51.346.452,00
5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	380.416.252,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.276.847.492,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	16.200.000,00
5.1.02.02.04.0005	Belanja Sewa Hauler	5.900.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	461.980.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.615.868.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	102.512.992,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	587.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	284.888.500,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	43.900.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.589.640.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	1.401.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.658.072.000,00
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	408.500.000,00
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	68.000.000,00
5.1.02.02.04.0145	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0194	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Radio	255.960.000,00
5.1.02.02.04.0328	Belanja Sewa System/Power Supply	6.900.000,00
5.1.02.02.04.0335	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kerja	891.875.000,00
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	236.250.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.832.140.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	51.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	35.000.000,00
5.1.02.02.05.0005	Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	25.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.709.900.000,00
5.1.02.02.05.0063	Belanja Sewa Pagar	11.240.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	71.400.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	71.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.604.725.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.102.325.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	777.400.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	325.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.397.500.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	25.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	450.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	6.200.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	722.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.948.900.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.680.950.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	3.445.365.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	253.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	569.585.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	32.769.016.911,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.261.755.000,00
5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	1.256.250.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	111.125.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	130.660.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	943.540.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.146.090.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	61.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	200.000.000,00
5.1.02.03.02.0098	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	750.000,00
5.1.02.03.02.0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	73.500.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.587.980.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	194.360.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	46.500.000,00
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	150.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	140.000.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	120.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.119.447.557,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.054.986.157,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	60.000.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	4.461.400,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.123.314.354,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	7.501.768.900,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	38.648.900,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.464.842.596,00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	550.060.000,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	567.993.958,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	2.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	262.500.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	262.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	44.456.220.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.456.220.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.619.460.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.693.460.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	100.230.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	43.070.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.118.322.200,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.716.910.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.852.950.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.863.960.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.401.412.200,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	20.309.362.200,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	92.050.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	83.562.588.357,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	82.400.203.857,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	80.930.203.857,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.470.000.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	751.694.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	736.694.500,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	410.690.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	365.690.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	24.809.428.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	24.809.428.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	24.809.428.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	237.242.177.872,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	237.242.177.872,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	237.242.177.872,00
5.1.05	Belanja Hibah	92.581.161.049,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	247.660.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	247.660.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	247.660.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	31.494.261.349,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.308.552.500,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.548.152.500,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.760.400.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.130.125.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.280.925.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.849.200.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.770.583.849,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.770.583.849,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	75.000.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	75.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	210.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	210.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	57.306.061.700,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	57.306.061.700,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	57.306.061.700,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.533.178.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.533.178.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.533.178.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.629.800.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.739.800.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.739.800.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.739.800.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.890.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.890.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.890.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>207.482.581.115,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.847.361.367,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.891.799.900,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.144.800.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	2.144.800.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	2.746.999.900,00
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	3.165.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	2.231.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	137.694.900,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	8.900.000,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	17.740.000,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	80.000.000,00
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	268.500.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.475.285.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.399.785.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	186.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	754.300.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	364.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	177.355.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	505.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.381.000.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	32.130.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	75.500.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	75.500.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	864.753.790,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	315.986.790,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	24.996.790,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	76.280.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	214.710.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	33.987.000,00
5.2.02.03.02.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	9.045.000,00
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	12.600.000,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	8.600.000,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	2.400.000,00
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	1.180.000,00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	162.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	514.780.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	50.400.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	27.380.000,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	437.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	7.850.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	7.850.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	7.850.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.744.005.247,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.806.698.847,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	26.373.108,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	62.900.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	264.771.739,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.452.654.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.937.306.400,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	856.305.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	11.076.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	698.600.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	48.595.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	779.870.400,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	542.860.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	658.334.511,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	235.250.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	156.200.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	79.050.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	411.434.511,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	106.750.000,00
5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	304.684.511,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	11.650.000,00
5.2.02.06.03.0010	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola	11.650.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.530.244.025,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.530.244.025,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.357.877.597,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	8.200.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	45.200.000,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	110.466.428,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	8.500.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	474.735.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	177.985.000,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	166.200.000,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	3.000.000,00
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	7.410.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	1.375.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	247.250.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	247.250.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	49.500.000,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	49.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.085.692.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.323.992.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	140.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.183.992.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.761.700.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	861.700.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.900.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	258.600.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	258.600.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	258.600.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	590.240.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	590.240.000,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	372.840.000,00
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	1.300.000,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	183.350.000,00
5.2.02.15.02.0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	8.750.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	24.000.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	456.100.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	456.100.000,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	160.000.000,00
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	5.000.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	291.100.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.360.382.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.360.382.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.360.382.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	14.650.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	14.650.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	14.650.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	14.889.119.886,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	14.597.229.386,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	14.597.229.386,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	208.890.500,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	208.890.500,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	83.000.000,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	83.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.545.570.008,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.545.570.008,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.545.570.008,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.043.144.343,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	9.530.944.343,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.530.944.343,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.508.198.533,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	718.398.500,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	153.989.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	20.006.810,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	72.620.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.057.731.500,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	3.500.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	3.500.000,00
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	3.500.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	158.700.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	158.700.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	158.700.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	350.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	350.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	350.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.799.583.304,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	56.860.826.775,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	48.547.073.775,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	44.341.466.751,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	3.926.319.724,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	279.287.300,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	8.313.753.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	8.313.753.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	24.375.646.929,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	11.775.787.929,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	8.639.162.929,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	3.136.625.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.204.600.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.204.600.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.030.000.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.030.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.365.259.000,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	7.365.259.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	16.693.384.600,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.787.169.600,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	3.787.169.600,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	10.946.215.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	4.915.780.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	6.030.435.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.960.000.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.960.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	36.869.725.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	14.941.800.000,00
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	393.300.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	14.548.500.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	21.927.925.000,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	350.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	21.577.925.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.228.492.101,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	93.500.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	93.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	93.500.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.505.200.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.500.000.000,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	1.500.000.000,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	5.200.000,00
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	5.200.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	7.629.792.101,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	7.627.797.101,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	7.627.797.101,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	1.995.000,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	1.995.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	564.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	564.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	564.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	564.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>48.961.912.720,03</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	48.961.912.720,03
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	48.961.912.720,03
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	48.961.912.720,03
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	48.961.912.720,03
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>361.071.673.199,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	39.671.261.169,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	39.671.261.169,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	39.671.261.169,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	39.671.261.169,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	321.400.412.030,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	143.947.030,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	143.947.030,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	143.947.030,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	321.256.465.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	321.256.465.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	90.540.000.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	125.046.646.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	105.669.819.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.671.602.861.975,03</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-139.055.513.482,03</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>165.755.513.482,03</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	165.755.513.482,03
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	165.755.513.482,03
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	165.755.513.482,03
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	165.755.513.482,03
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>26.700.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.700.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	26.700.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.700.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.700.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0,00
6.2.04.06.02	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00
6.2.04.06.02.0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>26.700.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>139.055.513.482,03</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Bantul, 31 Desember 2024

